

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 158/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN;

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-VI/ 2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2008;

Memperhatikan

: Laporan Panitia Kerja Belanja ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September - 8 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2008 merupakan perkiraan.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana Reboisasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-VI/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2008.
- (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp1.711.280.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp1.198.960.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - c. Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar Rp508.520.000.000,00 (lima ratus delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk masing-masing Daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan triwulan III dan triwulan IV.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.
- (5) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd

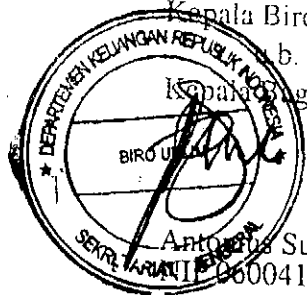
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

b.

Iskandar Nugraha T.U. Departemen



Anto Suharto

SEKRETARIS 060041107



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 158 /PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	58.429.446.416	27.940.659.341	86.370.105.757
1	Kab. Aceh Barat	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
2	Kab. Aceh Besar	-	1.611.063.362	-	1.611.063.362
3	Kab. Aceh Selatan	-	1.062.353.571	1.736.344.340	3.347.407.702
4	Kab. Aceh Singkil	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
5	Kab. Aceh Tengah	-	5.838.104.529	3.692.581.657	9.530.686.186
6	Kab. Aceh Tenggara	-	1.412.396.229	1.107.679.498	2.520.075.727
7	Kab. Aceh Timur	-	3.545.485.388	3.692.078.725	7.237.564.113
8	Kab. Aceh Utara	-	2.896.446.348	2.996.915.120	6.743.965.876
9	Kab. Bireun	-	1.529.053.570	2.478.895.296	5.375.341.644
10	Kab. Aceh Pidie	-	1.356.409.714	1.476.831.490	3.005.885.060
11	Kab. Simeulue	-	1.062.353.571	641.964.589	1.998.374.303
12	Kota Banda Aceh	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
13	Kota Sabang	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
14	Kota Langsa	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
15	Kota Lhokseumawe	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
16	Kab. Nagan Raya	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
17	Kab. Aceh Jaya	-	1.207.671.956	459.847.371	1.667.519.327
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	1.611.045.703	1.736.288.452	3.347.334.155
19	Kab. Gayo Lues	-	1.062.353.571	-	1.062.353.571
20	Kab. Aceh Tamiang	-	3.820.701.639	2.478.895.296	6.299.596.935
21	Kab. Bener Meriah	-	1.412.431.548	1.107.791.261	2.520.222.809
22	Kab. Pidie Jaya	-	1.356.409.714	641.964.589	1.998.374.303
23	Kota Sabulussalam	-	5.838.104.529	3.692.581.657	9.530.686.186
	Bagian Provinsi	-	11.685.889.292	-	11.685.889.292
II	Provinsi Sumatera Utara	-	39.794.705.395	5.588.131.868	45.382.837.263
1	Kab. Asahan	-	636.715.286	-	636.715.286
2	Kab. Dairi	-	4.112.288.150	-	4.112.288.150
3	Kab. Deli Serdang	-	636.715.286	-	636.715.286
4	Kab. Tanah Karo	-	636.715.286	-	636.715.286
5	Kab. Labuhan Batu	-	636.715.286	-	636.715.286
6	Kab. Langkat	-	636.715.286	48.225.578	700.267.926
7	Kab. Mandailing Natal	-	645.808.514	28.611.235	674.419.749
8	Kab. Nias	-	1.860.518.144	3.850.614.029	5.711.132.173
9	Kab. Simalungun	-	703.227.276	209.275.538	912.502.614
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	640.587.012	12.182.127	652.769.139
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	7.606.374.167	1.307.902.263	8.914.276.430
12	Kab. Tapanuli Utara	-	636.715.286	-	636.715.286
13	Kab. Toba Samosir	-	4.154.043.547	131.321.098	4.285.364.645
14	Kota Binjal	-	636.715.286	-	636.715.286
15	Kota Medan	-	636.715.286	-	636.715.286
16	Kota Pematang Siantar	-	636.715.286	-	636.715.286
17	Kota Sibolga	-	636.715.286	-	636.715.286
18	Kota Tanjung Balai	-	636.715.286	-	636.715.286
19	Kota Tebing Tinggi	-	636.715.286	-	636.715.286
20	Kota Pariang Sidempuan	-	636.715.286	-	636.715.286
21	Kab. Pakpak Bharat	-	636.715.286	-	636.715.286
22	Kab. Nias Selatan	-	636.715.286	-	636.715.286
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	636.715.286	-	636.715.286
24	Kab. Serdang Bedagai	-	636.715.286	-	636.715.286
25	Kab. Samosir	-	636.715.286	-	636.715.286
26	Kab. Batu Bara	-	636.715.286	-	636.715.286
	Bagian Provinsi	-	7.958.941.089	-	7.958.941.089
III	Provinsi Sumatera Barat	-	4.046.426.227	3.083.195.876	7.129.622.103
1	Kab. Limapuluh Kota	-	89.920.582	-	89.920.582
2	Kab. Agam	-	89.920.582	-	89.920.582
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.475.219.918	2.794.065.937	4.269.285.855
4	Kab. Padang Pariaman	-	89.920.582	-	89.920.582
5	Kab. Pasaman	-	89.920.582	-	89.920.582
6	Kab. Pesisir Selatan	-	98.613.867	13.411.516	112.025.383
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	-	101.554.527	22.073.120	123.627.647
8	Kab. Solok	-	90.886.538	1.899.964	92.786.502
9	Kab. Tanah Datar	-	207.277.887	236.713.265	443.991.152
10	Kota Bukit Tinggi	-	89.920.582	-	89.920.582
11	Kota Padang Panjang	-	89.920.582	-	89.920.582
12	Kota Padang	-	89.920.582	-	89.920.582
13	Kota Payakumbuh	-	89.920.582	-	89.920.582
14	Kota Sawahlunto	-	89.920.582	-	89.920.582
15	Kota Solok	-	89.920.582	-	89.920.582
16	Kota Panaman	-	89.920.582	-	89.920.582
17	Kab. Pasaman Barat	-	94.044.076	13.187.991	107.232.067
18	Kab. Dharmasraya	-	90.497.173	1.844.083	92.341.256
19	Kab. Solok Selatan	-	89.920.582	-	89.920.582
	Bagian Provinsi	-	809.285.257	-	809.285.257



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
IV	Provinsi Riau	-	185.816.781.591	10.338.043.956	196.154.825.547
1	Kab. Bengkalis	-	18.383.155.083	1.650.175.340	20.033.330.403
2	Kab. Indragiri Hilir	-	7.658.148.242	756.744.817	8.414.893.059
3	Kab. Indragiri Hulu	-	10.096.706.845	190.220.008	10.286.926.853
4	Kab. Kampar	-	19.638.095.489	434.700.778	20.072.796.267
5	Kab. Kuantan Singingi	-	13.995.742.910	80.188.692	13.985.932.602
6	Kab. Pelalawan	-	25.142.075.936	4.096.771.239	29.238.847.175
7	Kab. Rokan Hilir	-	8.090.906.233	433.527.270	8.524.433.503
8	Kab. Rokan Hulu	-	7.759.115.041	1.095.608.134	8.854.724.175
9	Kab. Siak	-	23.089.461.390	1.517.289.564	24.606.750.954
10	Kota Dumai	-	7.457.346.856	82.816.114	7.540.162.970
11	Kota Pekanbaru	-	7.432.671.263	-	7.432.671.263
	Bagian Provinsi	-	37.163.356.323	-	37.163.356.323
V	Provinsi Riau Kepulauan	-	-	-	-
1	Kab. Bintan	-	-	-	-
2	Kab. Nalun	-	-	-	-
3	Kab. Karimun	-	-	-	-
4	Kota Batam	-	-	-	-
5	Kota Tanjung Pinang	-	-	-	-
6	Kab. Lingga	-	-	-	-
	Bagian Provinsi	-	-	-	-
VI	Provinsi Jambi	-	104.058.817.362	3.911.692.307	107.970.509.669
1	Kab. Batanghari	-	16.692.796.727	406.536.593	17.099.333.320
2	Kab. Bungo	-	4.671.243.100	157.697.081	4.828.940.181
3	Kab. Kerinci	-	4.627.278.269	-	4.627.278.269
4	Kab. Merangin	-	4.624.992.030	-	4.624.992.030
5	Kab. Muaro Jambi	-	4.631.693.741	23.302.509	4.654.996.250
6	Kab. Sarolangun	-	4.684.941.485	204.246.219	4.889.187.704
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	16.828.308.253	867.054.540	17.695.362.793
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	17.225.109.717	2.215.414.882	19.440.524.599
9	Kab. Tebo	-	4.624.836.327	-	4.624.836.327
10	Kota Jambi	-	4.635.854.235	37.440.483	4.673.294.718
	Bagian Provinsi	-	20.811.763.478	-	20.811.763.478
VII	Provinsi Sumatera Selatan	-	68.407.600.472	-	68.407.600.472
1	Kab. Lahat	-	6.261.563.090	-	6.261.563.090
2	Kab. Musi Banyuasin	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
3	Kab. Musi Rawas	-	10.323.682.312	-	10.323.682.312
4	Kab. Muara Enim	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
6	Kab. Ogan Komering Ulu	-	4.748.422.050	-	4.748.422.050
7	Kota Palembang	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
8	Kota Pagar Alam	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
9	Kota Lubuk Linggau	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
10	Kota Prabumulih	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
11	Kab. Banyuasin	-	1.997.991.911	-	1.997.991.911
12	Kab. Ogan Ilir	-	1.954.502.870	-	1.954.502.870
13	Kab. OKU Timur	-	4.748.422.050	-	4.748.422.050
14	Kab. OKU Selatan	-	4.748.412.909	-	4.748.412.909
15	Kab. Empat Lawang	-	6.261.563.090	-	6.261.563.090
	Bagian Provinsi	-	13.681.520.100	-	13.681.520.100
VIII	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-
1	Kab. Bangka	-	-	-	-
2	Kab. Belitung	-	-	-	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-
7	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-
	Bagian Provinsi	-	-	-	-
IX	Provinsi Bengkulu	-	1.618.789.230	1.955.846.154	3.574.615.384
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	80.938.461	-	80.938.461
2	Kab. Bengkulu Utara	-	80.938.461	-	80.938.461
3	Kab. Rejang Lebong	-	80.938.461	-	80.938.461
4	Kota Bengkulu	-	80.938.461	-	80.938.461
5	Kab. Kaur	-	80.938.461	-	80.938.461
6	Kab. Seluma	-	364.223.076	977.923.077	1.342.146.153
7	Kab. Mukomuko	-	364.223.076	977.923.077	1.342.146.153
8	Kab. Lebong	-	80.938.461	-	80.938.461
9	Kab. Kepahiang	-	80.938.461	-	80.938.461
	Bagian Provinsi	-	323.753.851	-	323.753.851
X	Provinsi Lampung	-	8.472.672.409	-	8.472.672.409
1	Kab. Lampung Barat	-	376.563.218	-	376.563.218
2	Kab. Lampung Selatan	-	2.987.267.358	-	2.987.267.358
3	Kab. Lampung Tengah	-	376.563.218	-	376.563.218
4	Kab. Lampung Utara	-	376.563.218	-	376.563.218



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
5	Kab. Lampung Timur	-	-	-	376.563.218
6	Kab. Tanggamus	-	376.563.218	-	376.563.218
7	Kab. Tulang Bawang	-	470.586.438	-	470.586.438
8	Kab. Way Kanan	-	684.341.603	-	684.341.603
9	Kota Bandar Lampung	-	376.563.218	-	376.563.218
10	Kota Metro	-	376.563.218	-	376.563.218
	Bagian Provinsi	-	1.694.534.484	-	1.694.534.484
XI	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-
XII	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-
1	Kab. Bandung	-	29.944.861.511	-	29.944.861.511
2	Kab. Bekasi	-	1.424.132.466	-	1.424.132.466
3	Kab. Bogor	-	479.117.784	-	479.117.784
4	Kab. Ciamis	-	479.505.951	-	479.505.951
5	Kab. Cianjur	-	1.093.550.799	-	1.093.550.799
6	Kab. Cirebon	-	3.584.512.551	-	3.584.512.551
7	Kab. Garut	-	479.117.784	-	479.117.784
8	Kab. Indramayu	-	2.398.714.072	-	2.398.714.072
9	Kab. Karawang	-	1.805.517.784	-	1.805.517.784
10	Kab. Kuningan	-	479.117.784	-	479.117.784
11	Kab. Majalengka	-	1.273.261.958	-	1.273.261.958
12	Kab. Purwakarta	-	991.123.233	-	991.123.233
13	Kab. Subang	-	479.117.784	-	479.117.784
14	Kab. Sukabumi	-	479.333.399	-	479.333.399
15	Kab. Sumedang	-	480.641.102	-	480.641.102
16	Kab. Tasikmalaya	-	989.396.977	-	989.396.977
17	Kota Bandung	-	1.503.535.251	-	1.503.535.251
18	Kota Bekasi	-	479.117.784	-	479.117.784
19	Kota Bogor	-	479.117.784	-	479.117.784
20	Kota Cirebon	-	479.117.784	-	479.117.784
21	Kota Depok	-	479.117.784	-	479.117.784
22	Kota Sukabumi	-	479.117.784	-	479.117.784
23	Kota Cimahi	-	479.117.784	-	479.117.784
24	Kota Tasikmalaya	-	479.117.784	-	479.117.784
25	Kota Banjar	-	479.117.784	-	479.117.784
26	Kab. Bandung Barat	-	479.117.784	-	479.117.784
	Bagian Provinsi	-	1.424.132.466	-	1.424.132.466
		-	5.988.972.310	-	5.988.972.310
XIII	Provinsi Banten	-	-	-	-
1	Kab. Lebak	-	1.860.933.333	-	1.860.933.333
2	Kab. Pandeglang	-	148.874.666	-	148.874.666
3	Kab. Serang	-	148.874.666	-	148.874.666
4	Kab. Tangerang	-	744.373.333	-	744.373.333
5	Kota Cilegon	-	148.874.666	-	148.874.666
6	Kota Tangerang	-	148.874.666	-	148.874.666
	Bagian Provinsi	-	372.186.670	-	372.186.670
XIV	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-
1	Kab. Banjarnegara	-	45.759.978.832	-	45.759.978.832
2	Kab. Banyumas	-	545.599.750	-	545.599.750
3	Kab. Batang	-	590.725.596	-	590.725.596
4	Kab. Blora	-	572.203.375	-	572.203.375
5	Kab. Boyolali	-	15.255.110.340	-	15.255.110.340
6	Kab. Brebes	-	588.305.633	-	588.305.633
7	Kab. Cilacap	-	599.331.515	-	599.331.515
8	Kab. Demak	-	554.969.162	-	554.969.162
9	Kab. Grobogan	-	538.352.692	-	538.352.692
10	Kab. Jepara	-	1.103.882.103	-	1.103.882.103
11	Kab. Karanganyar	-	552.432.692	-	552.432.692
12	Kab. Kebumen	-	538.352.692	-	538.352.692
13	Kab. Kendal	-	555.279.750	-	555.279.750
14	Kab. Klaten	-	1.353.439.750	-	1.353.439.750
15	Kab. Kudus	-	538.352.692	-	538.352.692
16	Kab. Magelang	-	592.239.750	-	592.239.750
17	Kab. Pati	-	547.980.927	-	547.980.927
18	Kab. Pekalongan	-	538.352.692	-	538.352.692
19	Kab. Pemalang	-	539.812.383	-	539.812.383
20	Kab. Purbalingga	-	747.171.515	-	747.171.515
21	Kab. Purworejo	-	538.352.692	-	538.352.692
22	Kab. Rembang	-	568.842.103	-	568.842.103
23	Kab. Semarang	-	1.320.155.045	-	1.320.155.045
24	Kab. Sragen	-	699.082.103	-	699.082.103
25	Kab. Sukoharjo	-	538.352.692	-	538.352.692
26	Kab. Tegal	-	538.352.692	-	538.352.692
27	Kab. Temanggung	-	707.416.221	-	707.416.221
28	Kab. Wonogiri	-	538.712.959	-	538.712.959
29	Kab. Wonosobo	-	538.352.692	-	538.352.692
30	Kota Magelang	-	538.352.692	-	538.352.692
31	Kota Pekalongan	-	538.352.692	-	538.352.692
32	Kota Salatiga	-	538.352.692	-	538.352.692



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
33	Kota Semarang	-	538.352.692	-	538.352.692
34	Kota Surakarta	-	538.352.692	-	538.352.692
35	Kota Tegal	-	538.352.692	-	538.352.692
	Bagian Provinsi	-	9.151.995.780	-	9.151.995.780
XV	Provinsi DI Yogyakarta	-	8.299.527	-	8.299.527
1	Kab. Bantul	-	829.952	-	829.952
2	Kab. Gunung Kidul	-	3.319.811	-	3.319.811
3	Kab. Kulon Progo	-	829.952	-	829.952
4	Kab. Sleman	-	829.952	-	829.952
5	Kota Yogyakarta	-	829.952	-	829.952
	Bagian Provinsi	-	1.659.908	-	1.659.908
XVI	Provinsi Jawa Timur	-	42.471.036.818	-	42.471.036.818
1	Kab. Bangkalan	-	459.406.049	-	459.406.049
2	Kab. Banyuwangi	-	467.916.073	-	467.916.073
3	Kab. Blitar	-	1.055.020.938	-	1.055.020.938
4	Kab. Bojonegoro	-	4.936.430.667	-	4.936.430.667
5	Kab. Bondowoso	-	459.146.343	-	459.146.343
6	Kab. Gresik	-	459.146.343	-	459.146.343
7	Kab. Jember	-	1.008.422.019	-	1.008.422.019
8	Kab. Jombang	-	1.210.956.073	-	1.210.956.073
9	Kab. Kediri	-	1.203.846.884	-	1.203.846.884
10	Kab. Lamongan	-	459.146.343	-	459.146.343
11	Kab. Lumajang	-	459.146.343	-	459.146.343
12	Kab. Madiun	-	1.814.770.127	-	1.814.770.127
13	Kab. Magetan	-	495.730.127	-	495.730.127
14	Kab. Malang	-	1.923.172.932	-	1.923.172.932
15	Kab. Mojokerto	-	568.430.668	-	568.430.668
16	Kab. Nganjuk	-	1.386.558.235	-	1.386.558.235
17	Kab. Ngawi	-	3.135.091.071	-	3.135.091.071
18	Kab. Pacitan	-	506.268.030	-	506.268.030
19	Kab. Pamekasan	-	459.146.343	-	459.146.343
20	Kab. Pasuruan	-	903.652.289	-	903.652.289
21	Kab. Ponorogo	-	1.915.129.046	-	1.915.129.046
22	Kab. Probolinggo	-	459.146.343	-	459.146.343
23	Kab. Sampang	-	459.146.343	-	459.146.343
24	Kab. Sidoarjo	-	459.146.343	-	459.146.343
25	Kab. Situbondo	-	459.146.343	-	459.146.343
26	Kab. Sumenep	-	459.146.343	-	459.146.343
27	Kab. Trenggalek	-	1.033.226.343	-	1.033.226.343
28	Kab. Tuban	-	459.146.343	-	459.146.343
29	Kab. Tulungagung	-	607.245.803	-	607.245.803
30	Kota Blitar	-	459.146.343	-	459.146.343
31	Kota Kediri	-	459.146.343	-	459.146.343
32	Kota Madiun	-	459.146.343	-	459.146.343
33	Kota Malang	-	459.146.343	-	459.146.343
34	Kota Mojokerto	-	459.146.343	-	459.146.343
35	Kota Pasuruan	-	459.146.343	-	459.146.343
36	Kota Probolinggo	-	459.146.343	-	459.146.343
37	Kota Surabaya	-	459.146.343	-	459.146.343
38	Kota Batu	-	621.775.533	-	621.775.533
	Bagian Provinsi	-	8.494.207.394	-	8.494.207.394
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	-	21.921.317.039	21.234.901.099	43.156.218.138
1	Kab. Bengkayang	-	730.710.567	-	730.710.567
2	Kab. Landak	-	730.710.567	-	730.710.567
3	Kab. Kapuas Hulu	-	1.124.097.699	1.296.278.949	2.420.376.648
4	Kab. Ketapang	-	796.802.587	217.154.804	1.013.957.391
5	Kab. Pontianak	-	735.747.252	16.596.751	752.344.003
6	Kab. Sambas	-	732.372.504	5.476.369	737.848.873
7	Kab. Sanggau	-	1.612.826.891	43.196.259	1.656.023.150
8	Kab. Sintang	-	4.398.658.131	9.700.214.588	14.098.872.719
9	Kota Pontianak	-	730.710.567	-	730.710.567
10	Kota Singkawang	-	730.710.567	-	730.710.567
11	Kab. Sekadau	-	742.869.837	40.066.905	782.936.742
12	Kab. Melawi	-	3.674.033.867	9.698.761.870	13.372.795.537
13	Kab. Kayong Utara	-	796.802.587	217.154.804	1.013.957.391
	Bagian Provinsi	-	4.384.263.416	-	4.384.263.416
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	3.800.000.000	87.051.688.776	103.380.439.561	190.432.128.337
1	Kab. Barito Selatan	-	4.045.243.130	3.883.192.835	7.928.435.965
2	Kab. Barito Utara	-	4.330.947.439	5.407.244.039	9.738.191.478
3	Kab. Kapuas	-	6.584.157.354	12.714.955.846	19.299.113.200
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	3.937.649.246	3.531.084.646	7.468.733.892
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	4.938.824.815	7.396.395.459	12.335.220.274
6	Kota Palangkaraya	-	2.690.910.689	10.002.756	2.700.913.445
7	Kab. Barito Timur	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
8	Kab. Murung Raya	972.800.000	5.760.200.418	10.084.175.125	15.844.375.543
9	Kab. Pulang Pisau	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
10	Kab. Gunung Mas	1.459.200.000	2.940.613.229	857.666.479	3.798.279.708



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO (1)	DAERAH (2)	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH (3)	PSDH (4)	DR (5)	JUMLAH (6) = (3) + (4) + (5)
11	Kab. Lamandau	-	5.351.242.501	8.156.772.562	13.508.015.063
12	Kab. Sukamara	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
13	Kab. Katingan	-	13.203.863.463	34.442.003.722	47.645.867.185
14	Kab. Seruyan	-	7.842.158.228	16.896.946.092	24.739.104.320
	Bagian Provinsi	608.000.000	17.410.337.764	-	17.410.337.764
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	-	79.006.992.682	3.632.285.715	82.639.278.397
1	Kab. Banjar	-	2.723.260.113	295.556.294	3.018.816.407
2	Kab. Barito Kuala	-	2.826.486.714	635.705.881	3.462.192.595
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	2.670.281.650	120.983.055	2.791.264.705
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	2.633.566.422	-	2.633.566.422
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	9.631.272.458	102.095.169	9.733.367.627
6	Kab. Kota Baru	-	9.613.898.984	44.816.817	9.658.715.801
7	Kab. Tabalong	-	3.031.794.382	1.312.205.129	4.343.999.511
8	Kab. Tanah Laut	-	9.921.611.598	1.058.783.345	10.980.394.943
9	Kab. Tapin	-	2.640.349.837	22.352.527	2.662.702.364
10	Kota Banjar Baru	-	2.633.566.422	-	2.633.566.422
11	Kota Banjarmasin	-	2.633.566.422	-	2.633.566.422
12	Kab. Balangan	-	2.633.566.422	-	2.633.566.422
13	Kab. Tanah Bumbu	-	9.612.372.715	39.787.498	9.652.160.213
	Bagian Provinsi	-	15.801.398.543	-	15.801.398.543
XX	Provinsi Kalimantan Timur	-	257.921.954.518	131.321.098.902	389.243.053.420
1	Kab. Berau	-	51.971.237.829	7.319.446.883	59.290.684.712
2	Kab. Bulungan	-	19.050.520.624	34.444.853.671	53.495.374.295
3	Kab. Kutai Kartanegara	-	20.888.975.762	6.995.614.641	27.884.590.403
4	Kab. Kutai Barat	-	16.045.298.672	24.542.125.182	40.587.423.854
5	Kab. Kutai Timur	-	15.269.397.861	21.958.564.175	37.227.962.036
6	Kab. Malinau	-	11.733.319.863	10.333.405.806	22.066.725.669
7	Kab. Nunukan	-	13.954.667.460	17.653.132.095	31.607.799.556
8	Kab. Paser	-	14.437.153.121	8.073.956.448	22.511.109.569
9	Kota Balikpapan	-	8.597.398.483	-	8.597.398.483
10	Kota Bontang	-	8.597.398.483	-	8.597.398.483
11	Kota Samarinda	-	8.597.398.483	-	8.597.398.483
12	Kota Tarakan	-	8.597.398.483	-	8.597.398.483
13	Kab. Penajam Paser Utara	-	8.597.398.483	-	8.597.398.483
	Bagian Provinsi	-	51.584.390.911	-	51.584.390.911
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	-	925.010.989	1.117.626.373	2.042.637.362
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	87.362.148	186.271.062	273.633.210
2	Kab. Minahasa	-	30.833.699	-	30.833.699
3	Kab. Sangihe	-	30.833.699	-	30.833.699
4	Kota Bitung	-	30.833.699	-	30.833.699
5	Kota Manado	-	30.833.699	-	30.833.699
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	115.626.373	279.406.595	395.032.968
7	Kab. Minahasa Selatan	-	73.230.036	139.703.296	212.933.332
8	Kota Tomohon	-	30.833.699	-	30.833.699
9	Kab. Minahasa Utara	-	30.833.699	-	30.833.699
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (SITARO)	-	30.833.699	-	30.833.699
11	Kota Kotamubagu	-	87.362.148	186.271.062	273.633.210
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	87.362.148	186.271.062	273.633.210
13	Kab. Minahasa Tenggara (MITRA)	-	73.230.036	139.703.296	212.933.332
	Bagian Provinsi	-	185.002.207	-	185.002.207
XXII	Provinsi Gorontalo	-	3.931.296.703	4.749.912.087	8.681.208.790
1	Kab. Boalemo	-	383.428.155	260.239.301	643.667.456
2	Kab. Gorontalo	-	909.048.999	2.244.836.393	3.153.885.392
3	Kota Gorontalo	-	314.503.736	-	314.503.736
4	Kab. Pohuwato	-	314.503.736	-	314.503.736
5	Kab. Bone Bolango	-	314.503.736	-	314.503.736
6	Kab. Gorontalo Utara	-	909.048.999	2.244.836.393	3.153.885.392
	Bagian Provinsi	-	786.259.342	-	786.259.342
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	-	6.706.329.670	8.102.791.209	14.809.120.879
1	Kab. Banggai	-	1.085.888.900	2.677.162.221	3.763.051.121
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	444.876.840	498.908.413	943.785.253
3	Kab. Buol	-	802.005.083	1.712.483.010	2.514.488.093
4	Kab. Toli-Toli	-	330.586.593	110.533.248	441.119.841
5	Kab. Donggala	-	309.356.564	38.390.465	347.747.029
6	Kab. Morowali	-	757.621.000	1.561.659.331	2.319.280.331
7	Kab. Poso	-	494.243.649	666.664.131	1.160.907.780
8	Kota Palu	-	298.059.096	-	298.059.096
9	Kab. Parigi Moutong	-	349.004.590	173.120.325	522.124.915
10	Kab. Tojo Una-Una	-	493.421.417	663.870.065	1.157.291.482
	Bagian Provinsi	-	1.341.265.938	-	1.341.265.938
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	-	21.854.029	-	21.854.029
1	Kab. Bantaeng	-	397.345	-	397.345
2	Kab. Barru	-	1.352.796	-	1.352.796
3	Kab. Bone	-	2.785.972	-	2.785.972
4	Kab. Bulukumba	-	397.345	-	397.345



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
5	Kab. Enrekang	-	397.345	-	397.345
6	Kab. G o w a	-	397.345	-	397.345
7	Kab. Jeneponto	-	397.345	-	397.345
8	Kab. Luwu	-	397.345	-	397.345
9	Kab. Luwu Utara	-	1.830.521	-	1.830.521
10	Kab. Maros	-	397.345	-	397.345
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	397.345	-	397.345
12	Kab. Pinrang	-	2.531.184	-	2.531.184
13	Kab. Selayar	-	397.345	-	397.345
14	Kab. Sidenreng Rappang	-	397.345	-	397.345
15	Kab. Sinjai	-	397.345	-	397.345
16	Kab. Soppeng	-	397.345	-	397.345
17	Kab. Takalar	-	397.345	-	397.345
18	Kab. Tana Toraja	-	397.345	-	397.345
19	Kab. Wajo	-	397.345	-	397.345
20	Kota Pare-pare	-	397.345	-	397.345
21	Kota Makassar	-	397.345	-	397.345
22	Kota Palopo	-	397.345	-	397.345
23	Kab. Luwu Timur	-	1.830.521	-	1.830.521
	Bagian Provinsi	-	4.370.825	-	4.370.825
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	-	8.331.980.417	10.058.637.363	18.390.617.780
1	Kab. Majene	-	833.198.041	-	833.198.041
2	Kab. Mamuju	-	2.658.337.224	7.350.628.660	10.008.965.884
3	Kab. Polewali Mandar	-	835.262.496	-	835.262.496
4	Kab. Mamasa	-	833.198.041	-	833.198.041
5	Kab. Mamuju Utara	-	1.505.588.529	2.708.008.703	4.213.597.232
	Bagian Provinsi	-	1.666.396.086	-	1.666.396.086
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
1	Kab. Buton	-	-	-	-
2	Kab. Konawe	-	-	-	-
3	Kab. Kolaka	-	-	-	-
4	Kab. Muna	-	-	-	-
5	Kota Kendari	-	-	-	-
6	Kota Bau-bau	-	-	-	-
7	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	-
8	Kab. Bombana	-	-	-	-
9	Kab. Wakatobi	-	-	-	-
10	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-
11	Kab. Konawe Utara	-	-	-	-
12	Kab. Buton Utara	-	-	-	-
	Bagian Provinsi	-	-	-	-
XXVII	Provinsi Bali	-	-	-	-
1	Kab. Badung	-	-	-	-
2	Kab. Bangli	-	-	-	-
3	Kab. Buleleng	-	-	-	-
4	Kab. Gianyar	-	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	-	-
6	Kab. Karangasem	-	-	-	-
7	Kab. Klungkung	-	-	-	-
8	Kab. Tabanan	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-	-
	Bagian Provinsi	-	-	-	-
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
1	Kab. Bima	-	-	-	-
2	Kab. Dompu	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-
4	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-
5	Kab. Lombok Timur	-	-	-	-
6	Kab. Sumbawa	-	-	-	-
7	Kota Mataram	-	-	-	-
8	Kota Bima	-	-	-	-
9	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-
	Bagian Provinsi	-	-	-	-
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	5.098.974	-	5.098.974
1	Kab. Alor	-	113.310	-	113.310
2	Kab. Belu	-	113.310	-	113.310
3	Kab. Ende	-	113.310	-	113.310
4	Kab. Flores Timur	-	113.310	-	113.310
5	Kab. Kupang	-	113.310	-	113.310
6	Kab. Lembata	-	320.970	-	320.970
7	Kab. Manggarai	-	113.310	-	113.310
8	Kab. Ngada	-	163.173	-	163.173
9	Kab. Sikka	-	1.732.204	-	1.732.204
10	Kab. Sumba Barat	-	113.310	-	113.310
11	Kab. Sumba Timur	-	113.310	-	113.310
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	113.310	-	113.310



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	113.310	-	113.310
14	Kota Kupang	-	113.310	-	113.310
15	Kab. Rote Ndao	-	113.310	-	113.310
16	Kab. Manggarai Barat	-	113.310	-	113.310
17	Kab. Nagekeo	-	163.173	-	163.173
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	113.310	-	113.310
19	Kab. Sumba Tengah	-	113.310	-	113.310
	Bagian Provinsi	-	1.019.804	-	1.019.804
XXX	Provinsi Maluku	-	13.877.667.204	16.764.395.604	30.642.062.808
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	793.009.554	-	793.009.554
2	Kab. Maluku Tengah	-	1.174.092.938	1.342.939.850	2.517.032.788
3	Kab. Maluku Tenggara	-	1.078.425.659	1.005.807.854	2.084.233.513
4	Kab. Pulau Buru	-	3.330.739.219	8.939.849.247	12.270.588.466
5	Kota Ambon	-	793.009.554	-	793.009.554
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	1.427.239.374	2.235.029.221	3.662.268.595
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.427.191.802	2.234.861.578	3.662.053.380
8	Kab. Kepulauan Aru	-	1.078.425.659	1.005.807.854	2.084.233.513
	Bagian Provinsi	-	2.775.533.445	-	2.775.533.445
XXXI	Provinsi Maluku Utara	-	16.688.400.756	20.163.432.694	36.851.833.450
1	Kab. Halmahera Tengah	-	2.140.258.711	4.181.710.839	6.321.969.550
2	Kab. Halmahera Barat	-	968.306.789	51.746.101	1.020.052.890
3	Kota Temate	-	953.622.900	-	953.622.900
4	Kab. Halmahera Timur	-	1.672.229.580	2.532.379.719	4.204.609.298
5	Kota Tidore Kepulauan	-	1.740.653.964	2.773.501.608	4.514.155.572
6	Kab. Kepulauan Sula	-	1.699.187.043	2.627.371.960	4.326.559.003
7	Kab. Halmahera Selatan	-	3.208.376.829	7.945.764.706	11.154.141.535
8	Kab. Halmahera Utara	-	968.084.786	50.963.762	1.019.048.548
	Bagian Provinsi	-	3.337.680.154	-	3.337.680.154
XXXII	Provinsi Papua	-	45.325.538.461	54.763.692.308	100.089.230.769
1	Kab. Biak Numfor	-	1.531.660.945	1.987.698.505	3.519.359.450
2	Kab. Jayapura	-	1.072.983.146	529.307.850	1.602.290.996
3	Kab. Jayawijaya	-	906.510.769	-	906.510.769
4	Kab. Merauke	-	1.512.978.498	1.928.296.663	3.441.275.161
5	Kab. Mimika	-	5.600.427.232	14.924.559.068	20.524.986.300
6	Kab. Nabire	-	4.147.379.270	10.304.515.164	14.451.894.434
7	Kab. Paniai	-	906.510.769	-	906.510.769
8	Kab. Puncak Jaya	-	906.510.769	-	906.510.769
9	Kab. Yapen Waropen	-	906.510.769	-	906.510.769
10	Kota Jayapura	-	906.510.769	-	906.510.769
11	Kab. Sarmi	-	1.103.748.549	627.128.098	1.730.876.647
12	Kab. Keerom	-	1.512.943.348	1.928.164.901	3.441.128.249
13	Kab. Yahukimo	-	906.510.769	-	906.510.769
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	906.510.769	-	906.510.769
15	Kab. Tolikara	-	906.510.769	-	906.510.769
16	Kab. Boven Digoel	-	7.796.431.995	21.906.873.960	29.703.305.955
17	Kab. Mappi	-	906.510.769	-	906.510.769
18	Kab. Asmat	-	906.510.769	-	906.510.769
19	Kab. Waropen	-	906.510.769	-	906.510.769
20	Kab. Supiori	-	906.510.769	-	906.510.769
21	Kab. Mamberamo Raya	-	1.103.748.549	627.128.098	1.730.876.647
	Bagian Provinsi	-	9.065.107.701	-	9.065.107.701
XXXIII	Provinsi Papua Barat	-	66.554.540.659	80.413.217.583	146.967.758.242
1	Kab. Sorong	-	3.634.046.734	1.057.442.193	4.691.488.927
2	Kab. Manokwari	-	5.318.780.811	6.873.290.435	12.192.071.246
3	Kab. Fak Fak	-	8.536.278.909	17.980.373.098	26.516.652.007
4	Kota Sorong	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
5	Kab. Sorong Selatan	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
6	Kab. Raja Ampat	-	7.252.060.716	13.547.140.444	20.799.201.160
7	Kab. Teluk Bintuni	-	14.799.378.002	39.601.134.706	54.400.512.708
8	Kab. Teluk Wondama	-	3.719.906.254	1.353.836.707	5.073.742.961
9	Kab. Kaimana	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
	Bagian Provinsi	-	13.310.908.137	-	13.310.908.137
	TOTAL NASIONAL	3.800.000.000	1.198.960.000.000	508.520.000.000	1.711.280.000.000

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

ttt.



Kepala Biro Umum T.U. Departemen

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
RALAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 158/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN;

Berhubung dalam Lampiran Angka XVIII dan Angka XXXIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2007 terdapat kekeliruan maka perlu diadakan ralat sebagai berikut:

Tertulis:

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	3.800.000.000	87.051.688.776	103.380.439.561	194.232.128.337
1	Kab. Barito Selatan	-	4.045.243.130	3.883.192.835	7.928.435.965
2	Kab. Barito Utara	-	4.330.947.439	5.407.244.039	9.738.191.478
3	Kab. Kapuas	-	6.564.157.354	12.714.955.846	19.279.113.200
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	3.937.649.246	3.531.084.646	7.468.733.892
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	4.938.824.815	7.396.395.459	12.335.220.274
6	Kota Palangkaraya	-	2.690.910.689	10.002.756	2.700.913.445
7	Kab. Barito Timur	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
8	Kab. Murung Raya	972.800.000	5.760.200.418	10.084.175.125	16.817.175.543
9	Kab. Pulang Pisau	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
10	Kab. Gunung Mas	1.459.200.000	2.940.613.229	857.666.479	5.257.479.708
11	Kab. Lamandau	-	5.351.242.501	8.156.772.562	13.508.015.063
12	Kab. Sukamara	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
13	Kab. Katingan	-	13.203.863.463	34.442.003.722	47.645.867.185
14	Kab. Seruyan	-	7.842.158.228	16.896.946.092	24.739.104.320
	Bagian Provinsi	760.000.000	17.410.337.764	-	18.170.337.764
XXXIII	Provinsi Papua Barat	-	66.554.540.659	80.413.217.583	146.967.758.242
1	Kab. Sorong	-	3.634.046.734	1.057.442.193	4.691.488.927
2	Kab. Manokwari	-	5.318.780.811	6.873.290.435	12.192.071.246
3	Kab. Fak Fak	-	8.536.278.909	17.980.373.098	26.516.652.007
4	Kota Sorong	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
5	Kab. Sorong Selatan	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
6	Kab. Raja Ampat	-	7.252.060.716	13.547.140.444	20.799.201.160
7	Kab. Teluk Bintuni	-	14.799.378.002	39.601.134.706	54.400.512.708
8	Kab. Teluk Wondama	-	3.719.906.254	1.353.836.707	5.073.742.961
9	Kab. Kaimana	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
	Bagian Provinsi	-	13.310.908.137	-	13.310.908.137



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Seharusnya:

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2008

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	DANA BAGIAN DAERAH			
		IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	3.800.000.000	87.051.688.776	103.380.439.561	194.232.128.337
1	Kab. Barito Selatan	-	4.045.243.130	3.883.192.835	7.928.435.965
2	Kab. Barito Utara	-	4.330.947.439	5.407.244.039	9.738.191.478
3	Kab. Kapuas	-	6.564.157.354	12.714.955.846	19.279.113.200
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	3.937.649.246	3.531.084.646	7.468.733.892
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	4.938.824.815	7.396.395.459	12.335.220.274
6	Kota Palangkaraya	-	2.690.910.689	10.002.756	2.700.913.445
7	Kab. Barito Timur	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
8	Kab. Murung Raya	1.216.000.000	5.760.200.418	10.084.175.125	17.060.375.543
9	Kab. Pulang Pisau	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
10	Kab. Gunung Mas	1.824.000.000	2.940.613.229	857.666.479	5.622.279.708
11	Kab. Lamandau	-	5.351.242.501	8.156.772.562	13.508.015.063
12	Kab. Sukamara	-	2.678.513.500	-	2.678.513.500
13	Kab. Katingan	-	13.203.863.463	34.442.003.722	47.645.867.185
14	Kab. Seruyan	-	7.842.158.228	16.896.946.092	24.739.104.320
	Bagian Provinsi	760.000.000	17.410.337.764	-	18.170.337.764
XXXIII	Provinsi Papua Barat	-	66.554.540.659	80.413.217.583	146.967.758.242
1	Kab. Sorong	-	3.634.046.734	1.057.442.193	4.691.488.927
2	Kab. Manokwari	-	5.318.780.811	6.873.290.435	12.192.071.246
3	Kab. Fak Fak	-	8.536.278.909	17.980.373.098	26.516.652.007
4	Kota Sorong	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
5	Kab. Sorong Selatan	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
6	Kab. Raja Ampat	-	7.252.060.716	13.547.140.444	20.799.201.160
7	Kab. Teluk Bintuni	-	3.719.906.254	1.353.836.707	5.073.742.961
8	Kab. Teluk Wondama	-	3.327.727.032	-	3.327.727.032
9	Kab. Kaimana	-	14.799.378.002	39.601.134.706	54.400.512.708
	Bagian Provinsi	-	13.310.908.137	-	13.310.908.137

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2007 tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Ralat Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian 7.U. Departemen

Antonius Sularto
NIP. 060041107

